



CELIOS



LAPORAN KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2024

PESAWAT JET UNTUK SI KAYA,
SEPEDA UNTUK SI MISKIN

Media Wahyudi Askar • Galau D. Muhammad • Jaya Darmawan
Achmad Hanif Imaduddin • Bhima Yudhistira

LAPORAN KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA 2024

PESAWAT JET UNTUK SI KAYA,
SEPEDA UNTUK SI MISKIN

Publikasi	September 2024
Penerbit	Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta, Indonesia
Alamat Surat Elektronik	admin@celios.co.id
Situs Web	www.celios.co.id
Hak Cipta	© 2024 CELIOS Celios memegang hak cipta publikasi ini, termasuk teks, analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke admin@celios.co.id.
Ucapan Terimakasih	Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penelitian kami mengenai ketimpangan ini. Terima kasih kepada seluruh tim penulis yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan merumuskan temuan-temuan yang berharga. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua organisasi yang telah membantu memberikan beragam perspektif dalam penyusunan laporan ini. Masukan konstruktif dari mereka sangat membantu dalam memperbaiki dan memperkuat argumentasi kami. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan penanganan ketimpangan di Indonesia.
Pengutipan	Seluruh isi dalam laporan ini bebas untuk dikutip selama mencantumkan sumber sesuai konteks dan ketentuan penulisan yang berlaku. Yang disarankan: Askar, M. W. et al. (2024). <i>Indonesia's 2024 Economic Inequality Report</i> . Jakarta: Center of Economic and Law Studies. Report. Available at: www.celios.co.id
Penata Letak	Mohammad Arifin
Foto Sampul	Freepik.com



“

Sadarilah bahwa kita terlibat aktif menciptakan dunia yang timpang hari ini dalam berbagai cara dan bentuknya. Sudah waktunya membangun garis batas dengan tegas untuk memisahkan bahwa kita bukanlah mereka yang merampas dengan tamak.

”

Daftar Isi

i		Ucapan Terima Kasih
ii		Daftar Isi
1		Kata Pengantar
3		Temuan Utama
5		Pendahuluan
8		Menikmati Hidup versus Bertahan Hidup
8		Kejamnya Dunia bagi Jutaan Orang
10		Nasib Kelas Pekerja
11		Kenikmatan Dunia bagi Segelintir Orang Kaya
12		Lonjakan Keuntungan Korporasi Selama Krisis
16		Raksasa Antardekade
16		Perusahaan Ekstraktif Memperlebar Kesenjangan dan Kemiskinan
18		Monopoli Perusahaan Raksasa Industri Ekstraktif
21		Dari Demokrasi ke Oligarki
30		Bagaimana Kekuatan Korporat Memicu Ketimpangan
30		Menguntungkan Pemilik Modal, Menyisihkan Kepentingan Pekerja
33		Sat-set Menghindari Pajak
35		Kontrol Triliuner atas Tanah dan Sumber Daya Ekstraktif
37		Menghancurkan Lingkungan
41		Kontrol Korporat dan Oligarki terhadap Serikat Pekerja
44		Menuju Ekonomi Berkeadilan
44		Mengangkat Harga Diri Piramida Terbawah
46		Urun Rembuk Pembiayaan Pembangunan
49		Harapan yang Masih Ada
50		Diorama Harapan
53		Referensi

Kata Pengantar

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menapaki jalan panjang pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun di balik gemerlap pencapaian tersebut, terhampar bayang-bayang ketimpangan ekonomi yang semakin dalam. Dalam kacamata pembangunan, sering kali ukuran kemajuan di Indonesia terjepit pada indikator-indikator semu, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dan pembangunan infrastruktur. Walaupun keduanya penting, mereka sering kali menunjukkan secara vulgar wajah asli ketidaksejahteraan dan ketidakadilan sosial. Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang seberapa tebal isi dompet mereka.

Banyak masyarakat Indonesia tampak melupakan kenyataan pahit dari ketimpangan ekonomi yang kian meningkat. Mereka lelah. Ketika tantangan untuk memenuhi kebutuhan dasar begitu mendominasi, perhatian terhadap tingginya ketimpangan dan kacaunya kebijakan perpajakan dan perlindungan sosial menjadi prioritas kedua. Harapannya, studi ini bisa menjadi bacaan

peringat, bagi siapapun itu agar lebih peka, peduli dengan orang-orang di sekitar mereka, termasuk memberi tekanan dan masukan kepada pengambil kebijakan agar lebih berpihak pada kelompok 99 persen.

Kami mengajak para politisi, pengusaha, dan pengambil kebijakan untuk membaca hasil penelitian ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Jangan terjebak dalam perasaan sentimental atau kepentingan pribadi. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai bagian dari pekerjaan rumah besar yang menanti pemerintahan ke depan. Tantangan-tantangan besar, dari oligarki penguasaan sumber daya alam hingga peningkatan rasio pajak dan perbaikan jaring pengaman sosial, terbentang untuk kita hadapi bersama demi kesejahteraan masyarakat luas.

Akhirnya, kami berharap hasil penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademis mengenai ketimpangan ekonomi di Indonesia, tetapi juga dapat menyentuh relung hati pengambil kebijakan, khususnya pemerintahan terpilih agar lebih memberikan prioritas pada kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan. Penulis dan pembaca studi ini menantikan kebijakan itu. Masyarakat menunggu.



Media Wahyudi Askar
Director of Fiscal Justice, CELIOS

“

Kekayaan 50 orang
terkaya di Indonesia
setara dengan
kekayaan 50 juta orang
Indonesia.

CELIOS, 2024



Temuan Utama

Kekayaan Para Triliuner

Potensi Pajak Kekayaan

Rp81,6 T

Akumulasi 2 persen dari kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia

Kenaikan Kekayaan

174%

Kenaikan kekayaan tiga triliuner teratas selama 2020 – 2023

Lama Habis Kekayaan

630 tahun

Waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan kekayaan lima triliuner teratas dengan pengeluaran harian Rp2 miliar

Biaya Ibu Kota Nusantara

21%

kekayaan lima triliuner teratas di Indonesia

Lama Kerja

1 abad

Waktu yang dibutuhkan supaya pekerja secara umum dapat menyamai kekayaan lima triliuner teratas

Ketimpangan Pencapaian Si Kaya dan Si Miskin

6 tahun vs 133 tahun

Perbandingan lama munculnya kuadriliuner pertama di Indonesia dan durasi pengentasan kemiskinan

Kekayaan Pejabat Publik

Total Kekayaan Para Menteri

Rp24,52 T

Akumulasi kekayaan menteri-menteri Kabinet Joko Widodo hingga Februari 2024

Kekayaan Menteri Terafiliasi dengan Bisnis Tambang

Rp13,36 T

Akumulasi kekayaan 4 menteri afiliasi industri tambang dalam Kabinet Joko Widodo atau setara 50% dari total kekayaan para menteri.

Potensi Pajak Kekayaan

Rp490,35 M

Potensi pajak kekayaan tahunan yang diambil 2 persen dari Kekayaan Menteri Kabinet Joko Widodo hingga Februari 2024

Kenaikan Kekayaan Joko Widodo

186,24%

Persentase kenaikan total kekayaan Joko Widodo sejak menjabat pada 2014 dari Rp33,47 miliar menjadi Rp95,82 miliar pada 2023

Sasaran Redistribusi Tanah Prabowo

200 Ribu Unit

Jumlah unit petani yang mendapatkan lahan seluas 2 hektare dari lahan yang dikelola Prabowo Subianto

Lama Kerja

142 tahun

Waktu yang dibutuhkan oleh anak muda untuk bekerja agar memiliki kekayaan setara dengan Gibran Rakabuming Raka, dengan asumsi gaji konstan sebesar Rp15 juta per bulan

Potensi Alokasi Pajak Kekayaan dari 50 Orang Super Kaya

339.836

Jumlah rumah yang dapat dibangun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

15.103.800

Jumlah peserta makan siang gratis selama setahun penuh

3,8 juta

Jumlah sapi premium yang bisa dibeli untuk mengatasi masalah kelangkaan daging

13 juta

Jumlah rumah tangga terdampak kerugian konflik agraria dan sumber daya alam yang dapat disubsidi

1,54 GW

Total daya yang dihasilkan apabila diinvestasikan pada pembangkit listrik mikrohidro

3,2 juta ha

Jumlah hutan bakau yang dapat direstorasi

36,2 juta ton

Jumlah subsidi pupuk ke petani

3 Provinsi

Lokasi kawasan industri nikel yang dapat dikompensasi kerugian ekonominya, meliputi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah

96 juta

Jumlah pekerja penuh waktu yang dapat digaji satu tahun dengan membagi kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia

Potensi Alokasi Pajak Kekayaan Pejabat Publik

2.053

Jumlah rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kualitas terbaik

32 Juta

Jumlah anak di seluruh Indonesia yang dapat diberi makan bergizi gratis

6.925

Jumlah Guru Honorer yang mendapatkan Gaji Rp5.900.000 per bulan selama satu tahun.

38.580

Jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri yang mendapatkan UKT Gratis per semester.**

PENDAHULUAN



Latar Belakang

Di tengah gemerlapnya pertumbuhan ekonomi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam bentuk ketimpangan ekonomi yang terus membelit. Studi ini hadir sebagai jendela yang membuka tabir ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang mengancam kestabilan sosial dan masa depan yang berkelanjutan.

Laporan ini menyajikan data terkini yang mengungkapkan kesenjangan pendapatan yang semakin meluas, menunjukkan kontras mencolok antara kelompok sosial dan wilayah yang berbeda. Studi ini juga berfokus pada akar penyebab ketimpangan ekonomi,

tentang bagaimana kekuatan korporasi besar dan oligarki ekonomi memainkan peran krusial dalam memperparah ketimpangan.

Studi menawarkan jembatan menuju solusi yang konstruktif dan menyajikan rekomendasi kebijakan untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan harapan, rekomendasi ini akan menginspirasi langkah-langkah konkret yang tidak hanya mengatasi ketimpangan saat ini, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan Laporan



Mengidentifikasi dan Menganalisis ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Indonesia, termasuk perbedaan antara kelompok sosial dan wilayah, serta bagaimana ketimpangan ini mempengaruhi kestabilan sosial dan masa depan ekonomi.



Meneliti Akar Penyebab ketimpangan ekonomi, dengan fokus khusus pada peran kekuatan korporasi besar dan oligarki ekonomi dalam memperparah ketimpangan pendapatan dan kekayaan.



Menyajikan Data Terkini yang menggambarkan sejauh mana kesenjangan pendapatan telah berkembang dan perbedaannya di berbagai kelompok sosial dan wilayah.



Mendorong Langkah-langkah Konkret yang tidak hanya menangani ketimpangan yang ada, tetapi juga membangun dasar untuk masa depan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan analitik dengan pendekatan kuantitatif. Untuk pengumpulan data, metode kuantitatif melibatkan analisis data sekunder yang berasal dari statistik resmi, laporan lembaga internasional, data Forbes, dan berbagai informasi kredibel dari kalangan pers. Data kuantitatif yang dikumpulkan

mencakup distribusi pendapatan, distribusi kekayaan, indeks Gini, tingkat kemiskinan, dan indikator ekonomi lainnya. Terdapat dua kelompok penting yang menjadi rujukan dalam studi ini: daftar 50 orang terkaya di Indonesia menurut Forbes dan daftar kekayaan para menteri di Kabinet Joko Widodo.



Peningkatan Kekayaan Orang Super Kaya di Indonesia



109%

Lim Hariyanto Wijaya Sarwono
Total Kekayaan: Rp 77,76 Triliun



78,5%

Low Tuck Kwong
Total Kekayaan: Rp440,64 Triliun



70,2%

Prajogo Pangestu
Total Kekayaan: Rp707,94 Triliun



63%

Wijono & Hermanto Tanoko
Total Kekayaan: Rp49,41 Triliun



26%

Bachtiar Karim
Total Kekayaan: Rp63,18 Triliun



25%

Keluarga Hamami
Total Kekayaan: Rp25,92 Triliun



24%

Jogi Hendra Atmadja & family
Total Kekayaan: Rp71,28 Triliun



19%

Djoko Susanto
Total Kekayaan: Rp70,47 Triliun



15,9%

R, Budi & Michael Hartono
Total Kekayaan: Rp777,60 Triliun



12%

Saban Prawirawidjaja
Total Kekayaan: Rp15,23 Triliun



11%

Keluarga Tahir
Total Kekayaan: Rp68,04 Triliun



9%

Keluarga Arini Subianto
Total Kekayaan: Rp21,71 Triliun



8%

Martua Sitorus
Total Kekayaan: Rp52,65 Triliun



8%

Sri Prakash Lohia
Total Kekayaan: Rp137,70 Triliun



7%

Sukanto Tanoto
Total Kekayaan: Rp51,03 Triliun



7%

Ciputra family
Total Kekayaan: Rp27,54 Triliun



7%

Theodore Rachmat
Total Kekayaan: Rp51,84 Triliun



6%

Kuncoro Wibowo
Total Kekayaan: Rp17,01 Triliun



6%

Anthony Salim
Total Kekayaan: Rp166,86 Triliun



6%

Irwan Hidayat
Total Kekayaan: Rp17,50 Triliun



5%

Ciliandra Fangiono
Total Kekayaan: Rp38,07 Triliun



4%

Husain Djojonegoro
Total Kekayaan: Rp18,63 Triliun



4%

Chairul Tanjung
Total Kekayaan: Rp92,34 Triliun



3%

Keluarga Widjaja
Total Kekayaan: Rp174,96 Triliun



2%

Bambang Sutantio
Total Kekayaan: Rp26,73 Triliun

Sumber:
Data Forbes 25 orang terkaya 2023, diolah oleh peneliti

MENIKMATI HIDUP VERSUS BERTAHAN HIDUP



Kejamnya Dunia bagi Jutaan Orang

Di tengah badai pemutusan hubungan kerja, tingginya harga barang pokok, gaji sebatas upah minimum, masyarakat kelas bawah tetap berdiri tegak dan berjuang untuk anak, keluarga dan kehormatan mereka. Dalam gelombang ketidakpastian ekonomi hari ini, mereka bertarung untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan sumber daya yang terbatas.

Sebagian besar masyarakat piramida terbawah bergantung pada pekerjaan informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh harian, yang tidak memiliki perlindungan sosial atau tunjangan kesehatan. Ketika perekonomian melambat, mereka tidak hanya mengalami penurunan pendapatan, tetapi juga menjalani ekonomi subsistensi ketat dengan menghemat segala kebutuhan harian untuk bisa bertahan lebih lama.

Selain itu, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, seperti beras dan minyak, memaksa mereka berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak dari mereka juga menghadapi kesulitan akses ke layanan kesehatan yang memadai, dengan biaya pengobatan yang tinggi dan fasilitas kesehatan yang terbatas di daerah mereka. Pendidikan anak-anak sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas dan biaya tambahan, yang membuat mereka sulit untuk meraih peluang yang lebih baik. Keterbatasan finansial juga sering memaksa mereka terjebak dalam siklus utang dengan bunga tinggi, yang semakin membebani mereka. Ditambah dengan risiko lingkungan seperti banjir atau pencemaran, masyarakat kelas

bawah berjuang keras untuk bertahan hidup.

Ketika potret masyarakat kelas bawah di berbagai negara menunjukkan protes atau ketidakpuasan secara terang-terangan, masyarakat Indonesia justru menunjukkan ketenangan dan penerimaan yang luar biasa. Mereka tetap melanjutkan kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan dan harapan, menyadari bahwa perubahan besar mungkin tidak selalu dicapai dengan cepat. Mereka adalah tiang penyangga yang memastikan stabilitas sosial dan ekonomi. Mereka layak mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi, sebagai pengakuan atas ketangguhan dan dedikasi mereka yang luar biasa di masa-masa yang penuh tantangan ini.

Ironisnya, meskipun mereka seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar dari kue ekonomi untuk membantu mereka bangkit dari keterpurukan, kenyataannya justru berbeda. Sebagian besar kekayaan dan kesempatan sering kali terkonsentrasi di tangan sekelompok orang kaya, yang dengan akses dan privilese lebih besar, mampu memperkaya diri jutaan kali lebih banyak. Mereka mendapatkan keuntungan dari kebijakan, investasi, dan peluang yang tidak tersedia bagi masyarakat kelas bawah. Sementara itu, masyarakat kelas bawah, meskipun bekerja keras dengan keringat dan usaha yang sama, tidak memiliki akses yang **Ketika potret masyarakat kelas bawah di berbagai negara menunjukkan protes atau ketidakpuasan secara terang-terangan, masyarakat Indonesia justru menunjukkan ketenangan dan penerimaan yang luar biasa.** Mereka tetap melanjutkan kehidupan

sehari-hari dengan kesederhanaan dan harapan, menyadari bahwa perubahan besar mungkin tidak selalu dicapai dengan cepat. Mereka adalah tiang penyangga yang memastikan stabilitas sosial dan ekonomi.

Mereka layak mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi, sebagai pengakuan atas ketangguhan dan dedikasi mereka yang luar biasa di masa-masa yang penuh tantangan ini.

▲ **Ketika kemiskinan ekstrem diperangi secara progresif dengan target mendekati nol persen, ketimpangan justru dimaklumi tanpa intervensi berarti.**

Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, angka Produk Domestik Bruto (PDB) sering kali menjadi tujuan utama politisi, seakan-akan PDB merupakan satu-satunya barometer mutlak dari kemajuan. Namun, memusatkan perhatian hanya pada PDB ibarat melihat puncak gunung es tanpa menyelam ke dalaman laut. Meskipun PDB yang tinggi menyiratkan geliat transaksi ekonomi yang megah, ia tidak menyentuh inti dari kualitas pembangunan. Seperti mata uang yang dipertukarkan dalam pasar, PDB tidak memperhitungkan distribusi kekayaan yang timpang. Sebagian kecil individu mungkin meraup keuntungan, sementara mayoritas lainnya tertinggal dalam bayang-bayang kemiskinan.

Dorongan untuk mencapai angka PDB yang menanjak sering kali juga datang dengan harga yang mahal, seperti penjarahan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, yang akhirnya dapat memporak-porandakan ekosistem dan merusak kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan PDB sebagai tolok ukur tunggal adalah pendekatan yang sangat terbatas. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan benar-benar bermanfaat, kita perlu melihat lebih dari sekadar angka. Kita harus menilai siapa yang sudah berfoto ria di garis finis ekonomi dan siapa yang tidak bisa ikut perlombaan.



▲ **Pajak Kekayaan 50 triliun teratas setara dengan 2,45 persen APBN Indonesia 2024² dan 4,11 persen dari Target Penerimaan Pajak 2024³**

▲ **Dalam kurun waktu 6 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kuadriliuner pertama dalam sejarah. Pada saat yang sama, butuh waktu 133 tahun untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia**

Nasib Kelas Pekerja

Ekonomi pasar terbuka yang selalu diwacanakan sebagai solusi masyarakat global dalam arus pertukaran barang dan jasa tak terbatas, ternyata tidak bekerja ideal bagi semua orang. Potret terkini membuat kita menyaksikan dengan terang benderang bahwa episentrum penguasaan sumber daya semakin tak proporsional. Pekerja perlu bertahan lebih keras seiring pertumbuhan upah yang hanya naik 15% ketika tiga triliuner teratas justru mengalami lonjakan kekayaan 174%. Apabila kekayaan 50 orang teratas digabungkan, jumlahnya bahkan cukup untuk membayar gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja di Indonesia sepanjang tahun.

Di sisi lain, kesejahteraan guru honorer menjadi potret nyata kerentanan pekerja di sektor layanan dasar. Terdapat 74,3% guru honorer berpenghasilan di bawah 2 juta dan 46,9% di bawah 1 juta.⁴ Pengemudi ojek daring yang selalu dituntut dengan kualitas layanan berdasarkan penilaian bintang oleh

pelanggan justru menghadapi margin keuntungan yang tipis. Sebanyak 50,1% responden pengemudi ojek online hanya mendapatkan penghasilan Rp50 ribu – Rp100 ribu per hari. Sedangkan 44,1% responden mengeluarkan biaya operasional harian sebesar Rp50 ribu – Rp100 ribu.⁵

Dalam labirin sistem keuangan, masyarakat kecil sering kali terjebak dalam perangkap yang tak berujung saat mencoba meminjam uang dari bank. Keterbatasan akses kredit, akibat kurangnya jaminan dan riwayat kredit yang tidak memadai, membuat mereka terpaksa mencari jalan pintas. Sayangnya, jalan pintas ini sering kali adalah pinjaman online (pinjol) ilegal, yang menawarkan "solusi" dengan bunga tinggi dan syarat yang membelit. Mereka yang terjebak dalam lingkaran pinjol ini sering kali terjatuh dalam utang yang menggunung, dihadapkan pada praktik penagihan yang nir-etika.⁶

3X

Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%.

Pada saat yang sama, oknum pejabat mampu memanfaatkan kekuasaan untuk meningkatkan kekayaannya melalui kebijakan yang menguntungkan bisnis keluarga dan kroni. Tak jarang, mereka menggunakan insentif fiskal dan stimulus kebijakan pada industri terkait, sebagaimana kebijakan belanja perpajakan khususnya untuk sektor industri ekstraktif dan dukungan bisnis kesehatan di kala COVID-19.



Jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.

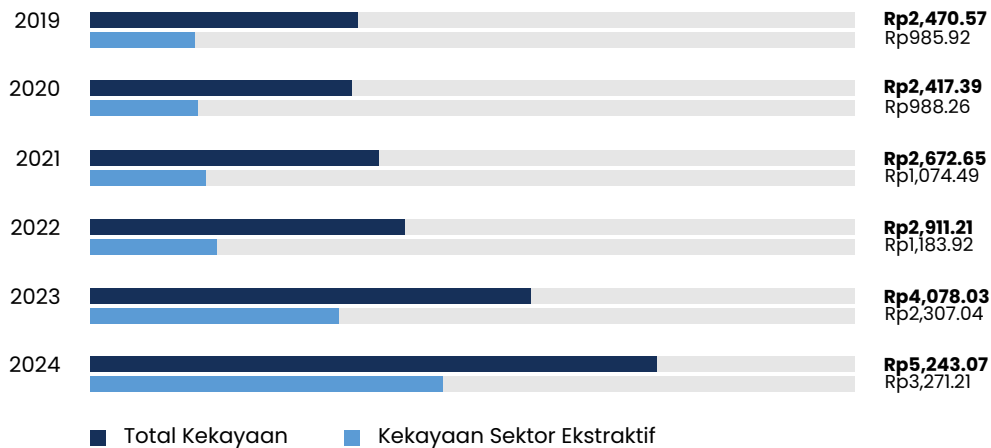
Di sisi lain, orang-orang kaya dilayani dengan karpet merah oleh bank, menikmati fasilitas pinjaman yang sangat menguntungkan. Dengan aset berharga yang dapat dijadikan agunan dan riwayat kredit yang menjanjikan, mereka mendapatkan akses mudah dan syarat pinjaman yang bersahabat. Perlakuan istimewa ini menciptakan jurang yang dalam antara yang kaya dan yang kurang mampu. Mereka yang membutuhkan justru terjebak dalam jebakan utang, sementara yang sudah mapan menikmati kemudahan dan keuntungan yang melimpah.

Kenikmatan Dunia bagi Segelintir Orang Kaya

Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.⁹



Diagram 1. **Total Kekayaan 50 Triliuner di Indonesia 2019 – 2024**
(dalam triliun rupiah)



Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Sementara itu, otoritas formal seakan minim keahlian statistik untuk mengejar pajak dari perusahaan milik orang super kaya yang terindikasi melakukan penghindaran pajak. Jarang terdengar ada triliuner yang ditangkap karena penggelapan pajak. Di sisi lain, di

tengah tren peningkatan biaya hidup dan kompleksitas masalah publik, justru kelas menengah-bawah yang menjadi bantalan dan dipaksa patuh membayar pajak ketika kelas atas lihai menghilang.



▲ Jika masing-masing dari lima orang terkaya membelanjakan Rp2 miliar setiap hari, mereka akan membutuhkan waktu 630 tahun untuk menghabiskan seluruh kekayaan gabungan kekayaannya.

▲ Jika kekayaan 50 triliuner terkaya Indonesia dibagikan ke seluruh pengangguran di Indonesia, maka masing-masing orang akan mendapat uang 10,4 juta rupiah.

Lonjakan Keuntungan Korporasi Selama Krisis

Perusahaan besar sering kali berhasil meraih keuntungan tinggi bahkan di tengah krisis ekonomi dengan menggunakan berbagai strategi yang menguntungkan mereka. Perusahaan-perusahaan raksasa punya uang lebih dari cukup untuk menyewa jasa konsultan perbankan dan perpajakan global untuk memindahkan pendapatan mereka ke

yurisdiksi dengan pajak rendah atau negara-negara *tax haven* melalui struktur perusahaan yang rumit dan teknik *transfer pricing* yang canggih. Dengan cara ini, mereka dapat mengalihkan keuntungan dari negara-negara dengan pajak tinggi menuju tempat-tempat yang menawarkan beban pajak yang lebih ringan.

▲ Pada saat bersamaan, pemerintah justru meresponsnya dengan cara-cara lemah. Ibarat paku, tetapi dipukul dengan bongkahan kapas.

Pemerintah merespon aksi para kelas atas dengan skema pengampunan pajak, yang menawarkan insentif bagi mereka untuk melaporkan kekayaan atau pendapatan yang belum tercatat dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tanpa denda. Korporasi besar ini diistimewakan dan mereka dapat memanfaatkan amnesti ini untuk membersihkan catatan pajak mereka tanpa harus membayar penalti yang berat. Ironisnya, insentif yang mulanya ditujukan untuk merangsang investasi sering kali hanya menguntungkan perusahaan besar. Alhasil, insentif hanya memperkuat dominasi perusahaan di pasar.

Pemerintah juga gagal menerapkan kebijakan anti-monopoli sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan besar untuk menguasai pasar, mengendalikan harga, dan menghambat pesaing-pesaing kecil. Dominasi ini memperkuat posisi mereka, memungkinkan mereka tetap meraih keuntungan tinggi meski di tengah krisis.



Photo by Zhu Hongzhi on Unsplash

Singapura, Surga Para Triliuner Indonesia

Paradoks mencolok terlihat ketika triliuner Indonesia, yang meraup harta melalui bisnis dan investasi di tanah air, memilih untuk menikmati kemewahan dengan tinggal di Singapura, sementara tetap menggali keuntungan dari bumi Indonesia. Meskipun mereka meraih untung dari pasar domestik, mereka lebih memilih Singapura karena menawarkan kebijakan pajak yang menggoda, kualitas hidup yang berkilau, dan perlindungan aset pribadi yang lebih kokoh. Ini menyiratkan ketimpangan antara tempat di mana sumber kekayaan dihasilkan dan di mana hasil kekayaan tersebut dipamerkan atau dinikmati. Singapura, dengan segala kemilau dan perlindungan kekayaan yang dijanjikannya, seakan menjadi magnet bagi para triliuner, sementara mereka sesungguhnya tetap bergantung pada infrastruktur dan sumber daya Indonesia yang menopang kekayaan mereka. Dengan kata lain, investasi dan keuntungan yang bersumber dari Indonesia seakan mengalir tanpa kembali ke ekonomi domestik.

Beberapa korporasi besar di Indonesia, termasuk grup perusahaan sawit, seperti Wilmar Group, Sinar Mas Group, Apical Group, dan Jhonlin Group, telah terlibat dalam berbagai kontroversi, seperti kebakaran hutan untuk pembukaan lahan dan kasus hukum seperti insider trading dan suap pajak. Sinar Mas Group, melalui Asia Pulp & Paper, dan Wilmar Group, yang juga pernah diselidiki terkait kebakaran hutan, serta Apical Group yang terafiliasi dengan Sukanto Tanoto yang memiliki sejarah masalah perpajakan, menunjukkan rekam jejak negatif. Jhonlin Group, di bawah konglomerat Haji Isam, terlibat dalam kasus suap pajak. Meskipun memiliki rekam jejak yang buruk, perusahaan-perusahaan ini tetap mendapat insentif dari kebijakan pemerintah, menimbulkan ironi di tengah kelangkaan minyak goreng dan lonjakan harga yang mempengaruhi publik.

Dominasi korporasi dalam perekonomian sering kali berkaitan erat dengan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu atau entitas bisnis. Korporasi besar, terutama yang beroperasi di sektor-sektor utama, seperti minyak, gas, dan sawit, dapat mengakumulasi kekayaan signifikan melalui keuntungan operasional, penghindaran pajak, dan konsolidasi pasar. Kekayaan yang terkumpul ini memberi mereka kekuatan politik dan ekonomi yang besar, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan yang menguntungkan mereka, seperti insentif pajak atau regulasi yang mempermudah operasional mereka. Dominasi korporasi juga dapat mengarah pada konsolidasi pasar: sedikit perusahaan menguasai pangsa pasar utama, mengendalikan harga, dan mengurangi persaingan.



“

Dunia selalu membutuhkan pahlawan untuk diarak ketika perjalanan krisis berhasil ditaklukkan. Mereka yang hidup nyaman di istana kekuasaan selalu menyanjung ketangguhan masyarakat untuk bangkit dan bertahan. Tapi itu hanya gimmick, karena mereka tak mengganjar perjuangan itu dengan insentif fiskal yang setimpal. 40 persen masyarakat bawah menerima lebih sedikit dari apa yang mereka bayarkan. Negara justru membuat mereka semakin miskin.

”

RAKSASA ANTAR DEKADE



Perusahaan Ekstraktif Memperlebar Kesenjangan dan Kemiskinan

Sepuluh dari 50 orang terkaya memiliki bisnis di industri ekstraktif. Selama beberapa dekade terakhir, industri-industri terkait sumber daya alam termasuk industri pertambangan dan ekstraktif menjadi kontributor utama dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia. Meski mereka menyumbang pendapatan yang menggiurkan bagi pemerintah melalui pajak dan royalti, hasil dari aktivitas ini sering kali tak berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Pendapatan yang didapatkan kadang-kadang hanya mengalir ke tangan segelintir elit, meninggalkan sebagian besar penduduk tanpa manfaat nyata. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang diciptakan sering kali tidak dapat dijangkau oleh masyarakat

setempat secara inklusif, melainkan bersifat sementara dan penuh risiko.

Industri ini sering kali mempekerjakan pekerja berketerampilan tinggi, yang biasanya adalah ekspatriat, sehingga membatasi peluang kerja bagi pekerja lokal yang kurang terampil. Kalau pun dipekerjakan, para pekerja lokal ini cenderung menerima upah rendah atau kurang layak. Selain itu, potret berbagai kawasan yang bergantung pada minyak memiliki tren pengeluaran yang rendah untuk alokasi layanan kesehatan dan pendidikan. Aktivitas pertambangan pada akhirnya tidak jarang menciptakan ketegangan sosial dan memperburuk kesenjangan.

▲ **1 dari 2 triliuner dalam 50 orang terkaya memiliki bisnis di industri ekstraktif dan berpotensi menyumbangkan pajak kekayaan sebesar 2,3 kuadriliun.**

Dalam konteks sosial, dampak dari perusahaan ekstraktif sering kali menyisakan duka mendalam. Banyak komunitas lokal terpaksa merelakan tanah dan sumber daya vital mereka akibat operasi ekstraktif, tanpa mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Perubahan struktur sosial yang dibawa oleh kehadiran perusahaan-perusahaan ini kadang-kadang mempengaruhi pola hidup

masyarakat dengan cara yang merugikan, menambah ketidaksetaraan yang sudah ada. Dari perspektif lingkungan, aktivitas ekstraktif sering meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapuskan. Pencemaran dan kerusakan ekosistem memperburuk kondisi kehidupan masyarakat miskin, yang biasanya paling rentan terhadap dampak lingkungan seperti pencemaran air dan tanah.



Sumber foto: Dokumentasi CELIOS

Dampak Industri Nikel terhadap Ekonomi dan Kesehatan

Studi Celios dan Crea pada 2024 menunjukkan bahwa industri nikel di Sulawesi dan Maluku mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan penurunan kesehatan. Meskipun awalnya menjanjikan keuntungan ekonomi \$4 miliar dalam lima tahun, dampak lingkungan jangka panjang mengurangi manfaat tersebut. Dalam skenario business-as-usual, degradasi lingkungan menyebabkan penurunan manfaat ekonomi pada tahun kedelapan hingga kesembilan dan dampak negatif terhadap sektor pertanian dan perikanan, dengan kerugian lebih dari \$387,10 juta selama 15 tahun. Emisi dari pemurnian nikel dan pembangkit listrik berbahan batu bara berpotensi menyebabkan lebih dari 3.800 kematian pada 2025 dan hampir 5.000 jiwa pada 2030, dengan beban ekonomi tahunan meningkat dari \$2,63 miliar pada 2025 menjadi \$3,42 miliar pada 2030. Komunitas lokal di Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah sangat menderita akibat polusi udara. Tanpa intervensi signifikan, dampak negatif industri nikel akan terus melebihi manfaat ekonominya.

Monopoli Perusahaan Raksasa Industri Ekstraktif

Realitas lebih menakutkan dari dampak negatif industri ekstraktif terhadap perekonomian dan kesehatan adalah industri ini dikuasai oleh tokoh yang dikenal luas oleh publik. Studi independen pada 2022 mengungkap 10 nama besar penguasa industri pertambangan di Indonesia sebagaimana terlampir pada tabel di bawah. Sepuluh nama tersebut setidaknya bertanggung jawab atas kepemilikan enam perusahaan tambang terbesar di Indonesia, meliputi PT Bumi Resources, Sinar Mas Mining Group, PT Adaro Energy, PT Indika Energy,

dan PT Bayan Resources dengan kapasitas pertambangan batu bara lebih dari 285 juta ton pada 2020 dan menguasai lahan seluas lebih dari 1 juta hektare di berbagai wilayah di Indonesia.

Dua perusahaan lain, yaitu Nusantara Group dan PT Toba Sejahtera, sebenarnya memiliki kapasitas yang relatif lebih kecil. Namun, keduanya dimiliki oleh dua figur publik sangat kuat di Indonesia, yaitu Prabowo Subianto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

- ▲ Empat menteri dengan kekayaan di atas Rp1 triliun dalam kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua terafiliasi dengan industri pertambangan, meliputi:



Sandiaga Salahuddin Uno

Kekayaan: Rp7,97 triliun



Erick Thohir

Kekayaan: Rp2,3 triliun



Prabowo Subianto

Kekayaan: Rp2,04 triliun



Luhut Binsar Pandjaitan

Kekayaan: Rp1,04 triliun


- ▲ Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, total kekayaan keempatnya mencapai lebih dari Rp13,36 triliun atau setara dengan 54,24 persen total kekayaan dalam kabinet.

Kondisi ini mengindikasikan monopoli industri pertambangan berkontribusi signifikan pada ketimpangan distribusi kekayaan. Potret nyata dampak industri ekstraktif ini terhadap peningkatan ketimpangan terlihat jelas di berbagai wilayah di Kalimantan. Meski memiliki potensi sumber daya alam yang besar, masyarakat lokal di Kalimantan justru

hidup dalam kemiskinan dan kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, keuntungan dari tambang mengalir ke perusahaan besar yang sebagian besar dimiliki oleh orang yang sama yang menduduki kekuasaan di pemerintahan di Indonesia.

	Tokoh	Kapasitas Pertambangan	Luas Lahan Konsesi	Wilayah
	 Aburizal Bakrie	81,1 juta ton batu bara	136.985 hektare	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan
	 Fuganto Widjaja	60 juta ton batu bara	278.802,8 hektare	Kalimantan Timur, Selatan, Tengah; Jambi, Riau; dan Sumatera Barat dan Selatan
	 Agus Lasmono	34,3 juta ton batu bara	76.120 hektare	Kalimantan Timur dan Tengah
	 Prabowo Subianto	N/A	62.753 hektare	Kalimantan Timur



Tokoh	Kapasitas Pertambangan	Luas Lahan Konsesi	Wilayah
 Sandiaga Uno	54,53 juta ton batu bara	316.619 hektare	Kalimantan Timur, Selatan, Tengah; Sumatera Selatan; dan Australia
 Edwin Soeryadjaya			
 Garibaldi "Boy" Thohir			



Tokoh	Kapasitas Pertambangan	Luas Lahan Konsesi	Wilayah
 Low Tuck Kwong	30,2 juta ton batu bara	126.293 hektare	Kalimantan Timur dan Selatan



Tokoh	Kapasitas Pertambangan	Luas Lahan Konsesi	Wilayah
 Luhut Binsar Pandjaitan	5,5 juta ton batu bara	14.019 hektare	Kalimantan Timur

Sumber: Project Multatuli, 2022

Dari Demokrasi ke Oligarki

Dalam sistem demokrasi yang ideal, kekuasaan didistribusikan secara luas melalui mekanisme pemilihan umum dan lembaga-lembaga independen, memastikan partisipasi aktif masyarakat dan akuntabilitas publik. Namun, ketika segelintir figur publik memperoleh kekuasaan dominan, mereka dapat memanipulasi sistem politik dan ekonomi untuk memperkuat posisi mereka, seringkali dengan mengabaikan atau merusak fungsi-fungsi demokratis seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan media. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi seperti transparansi dan partisipasi rakyat melemah, sementara ketimpangan sosial dan ekonomi meningkat. Kebijakan yang menguntungkan elite dan pengendalian sumber daya sering kali memperburuk ketidakadilan sosial, menghambat mobilitas sosial, dan memperburuk kesenjangan antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat umum.

Pergeseran dari demokrasi menuju oligarki dapat terlihat dalam konteks politik Indonesia dengan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang mendapatkan dukungan dari sejumlah nama besar baik di pemerintahan maupun bisnis. Dukungan ini mencerminkan bagaimana konsentrasi kekuasaan dapat memperkuat posisi politik dan ekonomi mereka.

Prabowo Subianto, sebagai calon presiden yang paling kaya, telah membangun jaringan politik yang luas dengan merangkul berbagai tokoh kunci di pemerintahan dan partai politik besar. Misalnya, dia mendapatkan dukungan dari beberapa partai politik besar yang memiliki kekuasaan legislatif dan eksekutif yang signifikan, seperti Partai Gerindra yang dipimpinnya sendiri dan koalisi partai pendukung lainnya.

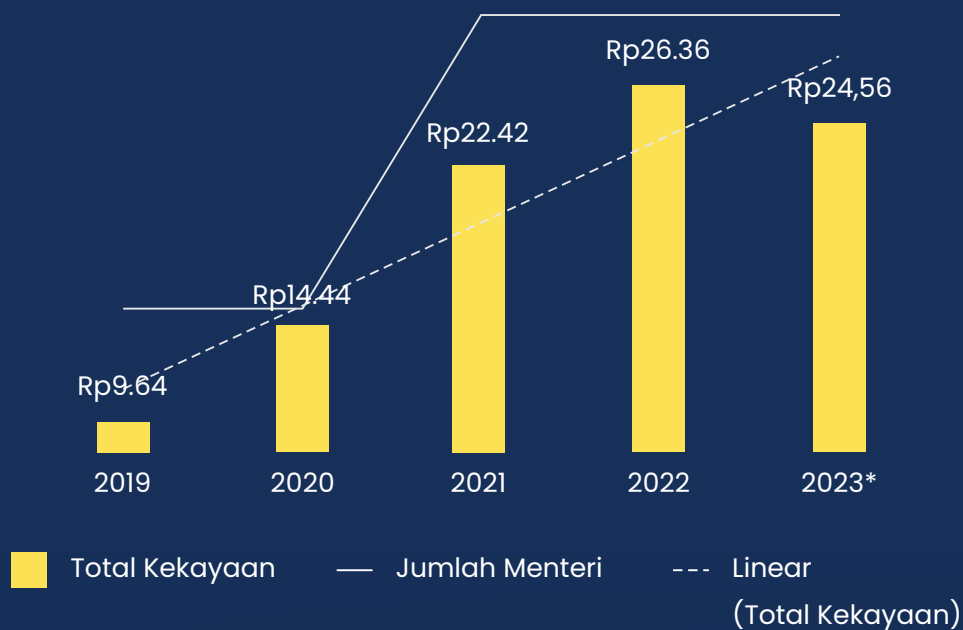
Di sisi lain, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden, memperoleh dukungan dari berbagai kelompok bisnis raksasa dan tokoh penting di sektor ekonomi. Keterkaitannya dengan keluarga Presiden Joko Widodo memberikan Gibran keuntungan politik dan ekonomi yang signifikan. Dukungan dari konglomerat dan pengusaha besar memberikan akses ke sumber daya ekonomi dan jaringan bisnis yang luas, memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi dan investasi yang mungkin menguntungkan mereka dan kelompok terkait.

Dukungan ini tidak hanya memperkuat posisi politik Prabowo dan Gibran, tetapi juga berpotensi mengarah pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir individu dan kelompok elite. Ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi karena keputusan kebijakan mungkin lebih banyak didasarkan pada kepentingan elite ketimbang kebutuhan masyarakat umum.



Sumber foto: Dokumentasi CELIOS

Kenaikan Harta Pejabat Publik di Tengah Penyempitan Anggaran Negara (dalam triliun rupiah)



*Total kekayaan pada 2023 menggunakan akumulasi laporan dari sejumlah menteri hasil reshuffle kabinet pada Februari 2024, seperti Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono. Jumlah menteri turut meningkat karena pada 2021, Joko Widodo menghidupkan kembali Kementerian Investasi dan mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai menterinya.

Tantangan fiskal yang semakin mencekam dengan pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% dari Rp226,19 triliun pada 2014 menjadi Rp616,19 triliun pada 2024, dan lonjakan rasio utang dari 24,7% menjadi 39,13%, ternyata tidak mengganggu tren kenaikan kekayaan para menteri di kabinet Joko Widodo.

Rerata kekayaan menteri, panglima, dan kepala kepolisian di bawah kepresidenan Joko Widodo mencapai Rp478,17 Miliar selama tahun 2019 – 2023. Akumulasi kekayaan kabinet pun meningkat sebesar 154,71% dari Rp9,64 triliun menjadi Rp24,56 triliun. Ini mengungkapkan bahwa kompleksitas sosial dan ekonomi tak pernah dirasakan oleh kalangan pemangku kebijakan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di bangunan megah milik negara.

Selama lima tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rombongan pejabat publik sedikitnya telah mengalami peningkatan kekayaan tahunan sebesar 8,61% yang mengungguli kenaikan tahunan upah pegawai secara Nasional berkisar 5,51%. Temuan ini semakin menegaskan bahwa pejabat publik telah menikmati kesejahteraan lebih cepat daripada masyarakat kebanyakan.

Peningkatan Kekayaan Presiden dan Menteri Pemerintahan Joko Widodo

(dari 2019 sampai dengan Pelaporan pada Februari 2024)







19,33%
Dari 2019 ke 2023

I Gusti Ayu Bintang



18,40%
Dari 2019 ke 2023

Teten Masduki



17,61%
Dari 2022 ke 2023

Zulkifli Hasan



15,07%
Dari 2019 ke 2023

Moeldoko



14,43%
Dari 2019 ke 2021

Sofyan Djilil



14,11%
Dari 2020 ke 2023

Yaqut Cholil Ooumas



12,17%
Dari 2019 ke 2022

Johnny G. Plate



9,76%
Dari 2020 ke 2023

Sakti Wahyu Trenggono



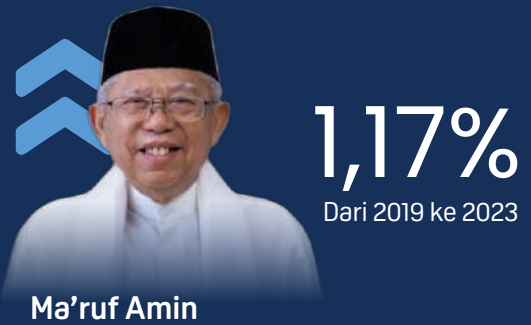
5,92%
Dari 2019 ke 2023

Budi Karya Sumadi



5,09%
Dari 2019 ke 2023

Yasonna Laoly



Menteri Sekaligus Ketua Partai

Empat menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo adalah Ketua Partai. Keempatnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pengusungan dan pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 – 2029.



Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan (sejak 23 Oktober 2019) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)



Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (sejak 23 Oktober 2019) dan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)



Zulkifli Hasan

Menteri Perdagangan (sejak 15 Juni 2022) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)



Agus Harimurti Yudhoyono

Menteri Agraria dan Tata Ruang (sejak 21 Februari 2024) dan Ketua Umum Partai Demokrat

Triliuner di antara Para Menteri

Sampai dengan Februari 2024, **tujuh menteri memiliki kekayaan terlapor lebih dari Rp1 triliun** dan dua di antaranya secara terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pemilihan Umum 2024: Erick Thohir dan Luhut Binsar Pandjaitan



Rp7.977.146.639.632

Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Rp4.871.469.603.758

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi



Rp2.665.900.513.951

Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan



Rp2.303.835.823.202

Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara



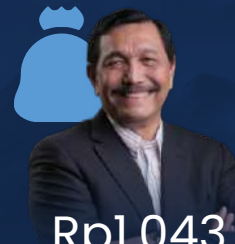
Rp2.042.682.732.691

Prabowo Subianto
Menteri Pertahanan



Rp1.196.888.974.071

Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian



Rp1.043.460.709.886

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi



Photo by Sachin Amjhad on Unsplash

Berangkat Kuliah dengan Pesawat Jet



Dear _____

Sebaiknya jangan posting-posting dulu, karena gak ada yang peduli dengan pencapaian _____ kecuali keluarga besar _____ sendiri.

Yang ada rakyat malah miris melihat kemewahan dan privileges yang _____ punya, sementara kami di sini sedanf ketar ketir mikirin nasib yang tidak menentu.

BAGAIMANA KEKUATAN KORPORAT MEMICU KETIMPANGAN



Menguntungkan Pemilik Modal, Menyisihkan Kepentingan Pekerja

Kekuatan korporat sering kali memicu ketimpangan dengan cara yang halus, mengutamakan keuntungan bagi segelintir orang kaya di atas kesejahteraan kelas pekerja. Dalam banyak kasus, kebijakan perusahaan cenderung lebih berpihak pada pemegang saham daripada pada pekerja, menciptakan jurang yang semakin lebar antara keduanya. Perusahaan, dalam mengejar laba dan nilai saham jangka pendek, kerap merombak struktur internalnya dengan memotong biaya dan mengurangi anggaran, dengan efisiensi upah dan jumlah pekerja.

Kebijakan ini sering menghasilkan keuntungan yang melimpah bagi pemegang saham, sementara pekerja, yang merupakan tulang punggung dari operasional perusahaan, harus menghadapi waktu kerja

yang panjang dan keras. Upah mereka mungkin dipangkas, dan manfaat yang mereka terima menjadi semakin minim, sementara eksekutif dan investor menikmati bonus atau dividen yang menggiurkan. Dalam kerangka ini, perusahaan mungkin menempatkan laba sebagai prioritas utama, mengabaikan investasi yang seharusnya dikhususkan untuk pelatihan dan pengembangan pekerja, serta pengurangan tunjangan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Pekerja yang berjuang keras untuk perusahaan sering kali tidak mendapatkan imbalan yang sebanding dengan kontribusi mereka, sementara keuntungan yang diperoleh dari strategi ini mengalir ke kantong mereka yang sudah kaya.

▲ **Mayoritas pekerja perlu bekerja selama 1 abad untuk menyamai kekayaan tahunan dari lima orang teratas.**

Gaji kelas pekerja di Indonesia sering kali terbelang rendah dibandingkan dengan biaya hidup yang terus meningkat. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan upah minimum, kenaikan tersebut sering kali tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

Di banyak perusahaan besar, insentif untuk eksekutif sering kali berbentuk paket kompensasi yang meliputi gaji dasar yang relatif kecil tetapi dilengkapi dengan bonus berbasis kinerja, opsi saham, dan tunjangan lainnya. Paket kompensasi ini dapat jauh melebihi gaji pekerja biasa dan berkontribusi pada akumulasi kekayaan yang besar.

Sebaliknya, pekerja di level bawah sering kali hanya mendapatkan gaji tetap tanpa tambahan insentif yang signifikan. Kenaikan gaji mereka mungkin ditentukan oleh kebijakan perusahaan atau upah minimum yang tidak selalu mencerminkan produktivitas atau kontribusi mereka. Sistem pengupahan di Indonesia menunjukkan kelemahan signifikan, terutama karena dominasi pemerintah dalam penetapan upah melalui regulasi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Meskipun bertujuan melindungi pekerja, upah minimum sering kali tidak mencerminkan kebutuhan riil dan biaya hidup yang sebenarnya, dengan penetapan yang kurang fleksibel terhadap inflasi dan perubahan ekonomi.





Salah Kaprah Interpretasi Data Kemiskinan Pemerintah

Garis kemiskinan di Indonesia saat ini sudah tidak relevan. Pada 2023, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah, standar kemiskinan adalah \$6,85 PPP per hari atau sekitar Rp1,2 juta per bulan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menetapkan garis kemiskinan di Indonesia pada Rp535.547 per bulan atau \$3,16 PPP per hari. Sebagai perbandingan, standar kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah bawah adalah \$3,2 PPP (\$3,65 dengan PPP terbaru atau sekitar Rp20.220 per kapita per hari), dan untuk negara berpendapatan menengah atas adalah \$5,5 PPP (\$6,85 dengan PPP terbaru atau sekitar Rp38.000 per kapita per hari). Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebenarnya lebih banyak dari yang terdeteksi oleh badan statistik. Banyak orang salah kaprah memahami kemampuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan, menganggap bahwa kemajuan ekonomi telah mengurangi masalah kemiskinan secara signifikan. Padahal kenyataannya, garis kemiskinan yang digunakan saat ini tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Gini ratio yang dihitung oleh BPS Indonesia kurang valid dalam menggambarkan ketimpangan sebenarnya karena menggunakan konsumsi rumah tangga sebagai dasar perhitungannya, bukan pendapatan. Metodologi berbasis konsumsi ini tidak dapat menangkap kekayaan atau pendapatan orang super kaya, yang cenderung memiliki pola konsumsi yang berbeda dan tidak mencerminkan pendapatan sebenarnya. Orang super kaya sering menabung atau menginvestasikan pendapatan mereka, sementara konsumsi sehari-hari mereka tidak setara dengan kekayaan yang mereka miliki. Selain itu, survei konsumsi yang digunakan BPS tidak menjangkau atau melibatkan orang super kaya secara memadai, terutama 1 persen teratas, sehingga ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang sebenarnya jauh lebih besar dari yang terlihat dalam data gini ratio BPS.

Sat-set Menghindari Pajak

Perusahaan besar memiliki kemampuan menghindari pajak karena kombinasi faktor yang canggih dan terampil. Dengan sumber daya finansial yang melimpah, mereka dapat mengakses layanan konsultan pajak, pengacara, dan ahli keuangan yang ahli dalam merancang strategi penghindaran pajak yang rumit tanpa tercatat sebagai pelanggaran berarti. Melalui struktur perusahaan global yang luas, mereka mendirikan entitas di negara-negara dengan tarif pajak rendah dan memanfaatkan pengaturan harga transfer untuk mengalihkan laba ke tempat yang lebih

menguntungkan secara pajak (tax heaven). Mereka juga menggunakan teknik akuntansi yang rumit untuk menunda pendapatan atau membesar-besarkan biaya, sehingga mereduksi laba kena pajak yang dilaporkan. Banyak dari taktik ini tetap legal karena memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada, sementara pengaruh politik dan ekonomi yang mereka miliki dapat memperhalus kebijakan perpajakan dan memperoleh konsesi dari pemerintah. Kombinasi dari semua ini memberi perusahaan besar keunggulan signifikan dalam permainan penghindaran pajak.

Strategi perusahaan besar mengurangi kewajiban pajak mereka:



Pengalihan Laba

Memindahkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Misalnya, melalui biaya royalti yang tinggi atau pengaturan harga transfer.



Penggunaan Struktur Perusahaan Internasional

Mendirikan perusahaan cangkang atau entitas di zona pajak seperti Bermuda atau Luxembourg untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah.



Penggunaan Utang

Mengambil utang dari anak perusahaan di negara dengan pajak rendah untuk mengalihkan beban bunga dan mengurangi laba kena pajak.



Pemanfaatan Kredit Pajak

Memanfaatkan kredit pajak dan insentif untuk mengurangi kewajiban pajak, serta memanfaatkan kerugian operasional dari tahun-tahun sebelumnya.



Manipulasi Laporan Keuangan

Menggunakan teknik akuntansi untuk menunda pendapatan atau memperbesar biaya, sehingga mengurangi laba yang dilaporkan.

Penghindaran pajak oleh perusahaan besar berdampak negatif pada pelayanan publik dalam beberapa cara:



Penurunan Pendapatan Pajak

Pemerintah kehilangan pendapatan yang penting untuk membiayai layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.



Menurunnya Kualitas Layanan

Anggaran yang berkurang dapat mengakibatkan kualitas layanan publik menurun.



Ketidakadilan Sosial

Beban pajak sering kali beralih ke individu dan usaha kecil, meningkatkan ketidakadilan.



Kurangnya Investasi Publik

Pendapatan yang lebih sedikit membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan program sosial.



Mengurangi Kepercayaan Publik

Ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kontrol Triliuner atas Tanah dan Sumber Daya Ekstraktif

Para triliuner sering kali menguasai lahan pertanahan di Indonesia melalui serangkaian strategi yang canggih dan terencana. Dengan kekuatan finansial yang sangat besar, mereka mampu mengakuisisi lahan dalam skala besar atau berinvestasi dalam proyek-proyek besar yang membutuhkan penguasaan tanah yang luas. Modal yang besar memberikan mereka kemampuan untuk membeli tanah yang mungkin tidak terjangkau oleh individu atau perusahaan kecil, serta untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek yang melibatkan tanah yang sangat luas.

Selain itu, para triliuner sering kali menjalin kemitraan dengan pemerintah atau perusahaan lokal untuk mendapatkan hak atas lahan. Dalam kemitraan ini, mereka dapat memperoleh izin dan hak atas tanah yang mungkin sulit diakses melalui jalur konvensional. Kolaborasi ini sering kali mempermudah proses perolehan tanah dan memberikan akses yang lebih mudah kepada mereka.

Penguasaan lahan oleh triliuner juga sering melibatkan pemanfaatan celah dalam hukum dan regulasi. Mereka dapat mengakali peraturan atau menggunakan metode legal yang memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang pertanahan yang ada. Ini memungkinkan mereka untuk memperoleh tanah dengan cara yang lebih menguntungkan, sering kali dengan mengabaikan regulasi yang ada.

Belanja perpajakan pemerintah yang tidak tepat sasaran dapat memperburuk ketimpangan dengan memberikan keuntungan tidak proporsional kepada orang kaya dan pemilik perusahaan besar. Ketika pemerintah memberikan subsidi atau insentif fiskal yang tak selektif, perusahaan yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya atau energi sering kali diuntungkan daripada usaha kecil atau individu.



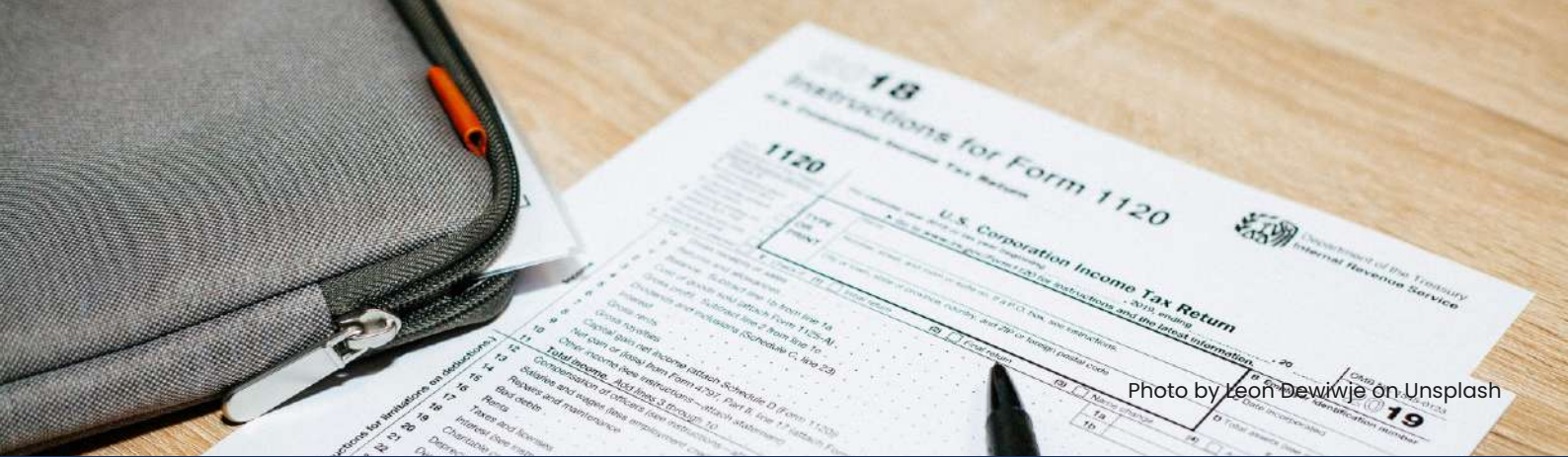


Photo by Leon Dewijne on Unsplash

Tinjau Ulang Belanja Perpajakan

Belanja perpajakan yang memiliki konsep hidden subsidy dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang selalu dominan, kurang lebih 50% dari total belanja perpajakan. Namun, tujuan belanja perpajakan di luar kesejahteraan masyarakat juga masih besar, yaitu di tahun 2024 saja diproyeksikan mencapai Rp189,7 triliun. Ada beberapa komponen belanja perpajakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung dunia bisnis yang perlu dievaluasi atau dihilangkan demi asas keadilan pajak. Bahkan, berdasarkan USAID Report berjudul Medium and Long Term Impact of Tax Expenditures tahun 2020 belanja perpajakan untuk pengembangan UMKM masih tidak signifikan dalam meningkatkan PDB UMKM karena sedikitnya fasilitas serta masih rendahnya wajib pajak UMKM.

Batasan Rp4,8 miliar pajak bagi UMKM juga lebih banyak dinikmati pengusaha kelas menengah dibanding mikro dan kecil. Maka dari itu, lebih baik ambang batasnya diturunkan hingga Rp600 juta misalnya, untuk meminimalisir perusahaan besar untuk melakukan praktik membagi badan usaha untuk penghindaran pajak.

Beberapa bentuk belanja perpajakan yang digunakan untuk mendukung investasi dan bisnis, termasuk para konglomerat, meliputi:

- **Fasilitas Perpajakan untuk Perusahaan Modal Ventura:** Insentif ini diberikan untuk mendorong investasi dari perusahaan modal ventura.
- **Fasilitas Pembebasan PPh atas Dividen:** Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh), untuk mendorong reinvestasi domestik.
- **Pemupukan Dana Cadangan:** Fasilitas ini memungkinkan perusahaan tambang untuk membentuk dana cadangan sebagai biaya, terutama untuk reklamasi lahan yang terdampak. Hal ini menjadi ironis mengingat banyak lubang tambang yang belum direklamasi, dengan 87.307 hektar lubang tambang yang belum ditutup, 23.551 hektar di antaranya berada di kawasan hutan tanpa izin.
- **Fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah:** Ini meliputi bunga atau imbalan dari surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional serta penghasilan pihak ketiga dari jasa terkait.
- **PPh DTP Panas Bumi:** Memberikan keringanan pajak untuk sektor energi panas bumi.
- **Bea Masuk dan Cukai untuk Kawasan Ekonomi Khusus:** Penghapusan bea masuk dan cukai pada impor barang untuk kawasan ini.
- **Bea Masuk Bebas untuk Barang Berdasarkan Kontrak:** Termasuk barang untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, panas bumi, serta kontrak karya pertambangan batu bara.

Proyeksi akumulasi masing-masing bentuk belanja perpajakan ini menjadi perhatian penting. Berdasarkan temuan dan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait pelaporan belanja perpajakan. Pertama, belum ada ukuran kinerja yang jelas untuk memantau keberhasilan tujuan belanja perpajakan. Kedua, belum ada mekanisme korektif yang memadai terkait kebijakan sunset provision jika evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif.

Menghancurkan Lingkungan

Pada 2022, Oxfam melakukan analisis terperinci terhadap 125 miliarder terkaya di dunia dan menemukan bahwa, rata-rata, melalui investasi, mereka mengeluarkan tiga juta ton CO2 per tahun, satu juta kali lebih banyak dibandingkan rata-rata emisi yang dihasilkan oleh 90% populasi manusia terbawah.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas korporat, seperti penebangan hutan atau pencemaran industri, tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menghancurkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber

daya alam. Pertanian yang dulu subur berubah menjadi gurun, dan kualitas hidup yang dulu tinggi kini terancam. Ketidakadilan ini semakin diperburuk oleh korupsi yang merajalela. Alhasil, keputusan pemerintah seringkali dikuasai oleh kepentingan perusahaan besar yang berusaha mengabaikan kepentingan masyarakat kecil demi keuntungan mereka sendiri. Pencemaran yang merusak kualitas udara dan air menambah penderitaan masyarakat miskin, yang sering kali tidak memiliki akses ke sumber daya atau dukungan untuk mengatasi dampak tersebut.

▲ Pajak kekayaan dari sektor ekstraktif pada daftar 50 triliuner terkaya terkaya dapat mensubsidi kerugian akibat konflik agraria untuk 13 juta rumah tangga.

Oligarki Miliarder dengan Partai Politik dan Penguasa Eksekutif

Hubungan antara miliarder oligarki, partai politik, dan penguasa eksekutif sering kali memperparah ketimpangan ekonomi dan sosial. Ketika miliarder oligarki mendanai kampanye politik dan memberikan dukungan finansial kepada partai-partai politik serta penguasa eksekutif, mereka memperoleh akses istimewa dan pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan.

Sebagai imbalannya, penguasa eksekutif dan partai politik mungkin mengimplementasikan kebijakan yang menguntungkan oligarki, seperti pengurangan pajak, subsidi, atau regulasi yang lemah.

Kebijakan-kebijakan ini sering kali meningkatkan kekayaan dan kekuatan oligarki tanpa mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat luas. Ketimpangan meningkat karena keuntungan yang diperoleh oleh elit ekonomi tidak dibagikan secara merata. Sebaliknya, kebijakan yang dihasilkan semakin memperkaya mereka yang sudah kaya melintir sejak lahir sekaligus memperburuk kondisi ekonomi bagi mayoritas populasi yang miskin dari generasi ke generasi.

Bagaimana para triliuner mempengaruhi kebijakan publik?



- 1 Donasi Politik
- 2 Lobi dan Pengaruh Langsung
- 3 Media dan Publikasi termasuk buzzer
- 4 Investasi dan Kepemilikan Perusahaan
- 5 Sponsorship dan Filantropi
- 6 Kebijakan dan Regulasi
- 7 Jaringan dan Koalisi Politik
- 8 Pengesahan Undang-Undang
- 9 Relasi Internasional dan Diplomasi

Rp478,17 miliar

Per Orang

Selama 2019 - 2023, rerata kekayaan menteri dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua adalah Rp478,17 miliar per orang



17 % atau 7 Menteri

Sebanyak 17 persen atau 7 menteri memiliki kekayaan di atas Rp1 triliun.

Rp492,86 miliar

Per Tahun

Apabila menteri Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua pada 2024 dikenakan pajak kekayaan sebesar 2 persen, maka negara mendapat pemasukkan tambahan sekitar Rp492,86 miliar per tahun.



0,0039 persen Rerata Kekayaan Menteri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5 juta dan tunjangan jabatan sebesar Rp13,6 juta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Secara keseluruhan, setiap menteri menerima setidaknya Rp18,65 juta per bulan. Namun, angka ini hanya merepresentasikan 0,0039 persen dari rerata kekayaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo selama periode kedua.



10 % atau 4 Menteri

10 persen atau 4 menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo merangkap sebagai ketua partai.

2.053 Rumah

Subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Pajak kekayaan sebesar 2 persen atas kekayaan menteri Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua pada 2024, sedikitnya dapat membangun 2.053 rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kualitas terbaik seharga Rp240 juta.



2,4%

Peningkatan rata-rata upah nasional

Dari 2019 sampai dengan 2023, rata-rata upah di Indonesia secara nasional hanya mengalami peningkatan sebesar 2,4 persen. Sementara rerata kekayaan Presiden Joko Widodo bertumbuh hingga 75,12 persen sejak 2019.

>32 Juta

Anak

Dengan asumsi biaya satu porsi program makan siang bergizi gratis adalah Rp15.000, maka total pajak kekayaan para menteri dalam Kabinet Joko Widodo dapat memberi makan sekitar 32,85 juta anak di seluruh Indonesia.

Rp36,72 miliar

Sampai 2023, kekayaan Prabowo Subianto meningkat Rp36,72 miliar sejak menjadi menteri pada 2019.

2 Ha/petani

Jika Prabowo Subianto mengelola tanah seluas 400 ribu hektar, luas tanah tersebut dapat dibagi untuk petani sejumlah 2 ha/petani kepada 200 ribu petani

2.723.577

Anak mendapat paket makan siang bergizi

Pajak kekayaan sebesar 2 persen atas kekayaan Prabowo Subianto pada 2023 mencapai Rp40,85 miliar sehingga cukup untuk membiayai paket Makan Siang Bergizi Gratis senilai Rp15.000 untuk sedikitnya 2,7 juta anak di seluruh Indonesia.

142 Tahun

Lama pekerja dengan gaji 15 juta per bulan untuk menyamai kekayaan Gibran

Pada 2023, Gibran Rakabuming Raka memiliki kekayaan terlapor sebanyak Rp25.576.015.455 pada usia 34 tahun. Dengan asumsi, anak muda mendapatkan gaji sebesar 15 juta per bulan secara konstan, maka anak muda membutuhkan sedikitnya 1.705 bulan atau 142 tahun untuk menyamai kekayaan Gibran.

Kontrol Korporat dan Oligarki terhadap Serikat Pekerja

Pengaruh korporat terhadap serikat pekerja di Indonesia seringkali menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan hak-hak pekerja dan menghambat kebebasan berorganisasi. Melalui dukungan finansial, intimidasi, dan pembentukan serikat pekerja yang terkontrol, korporat dan oligarki dapat memastikan bahwa kepentingan mereka terlindungi sambil mengabaikan hak-hak dasar pekerja. Dalam sektor perkebunan kelapa sawit, misalnya, kekuatan besar perusahaan seringkali mengendalikan serikat pekerja, menjadikannya sekadar cermin dari keinginan perusahaan dan bukan suara asli para pekerja. Pekerja yang berani bersuara atau mencoba membentuk serikat independen seringkali terjebak dalam perangkap intimidasi, dihadapkan pada

ancaman pemecatan atau tekanan yang mengikis hak-hak mereka. Hasilnya adalah lingkungan kerja yang diselimuti oleh bayang-bayang ketidakadilan, kebebasan berorganisasi menjadi sebuah ilusi, dan hak-hak dasar pekerja terpinggirkan.

Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, serikat buruh, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja, justru terperangkap dalam jaring-jaring oligarki politik. Oligarki sering kali mendukung serikat buruh yang selaras dengan kepentingan politik atau ekonomi mereka, menjadikannya alat untuk memperjuangkan agenda golongan tertentu, daripada hak-hak pekerja secara umum.

Kemunculan Pemengaruh (*Influencer*) sebagai Orang Kaya Baru

Fenomena influencer yang memperoleh kekayaan dari platform seperti YouTube tidak hanya menyoroti tantangan perpajakan tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi dan memperkuat dinamika kekuasaan politik. Influencer, yang meraih pendapatan besar dari iklan, sponsorship, dan donasi penggemar, sering kali tidak membayar pajak secara memadai, yang menciptakan ketidakadilan. Mereka menikmati kekayaan tanpa kontribusi yang sesuai terhadap pembiayaan layanan publik. Ketidapatuhan pajak ini memperburuk kesenjangan antara mereka yang membayar pajak secara penuh dan mereka yang tidak sehingga memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, fenomena ini dapat memperlebar jurang antara sektor formal dan informal dalam ekonomi. Influencer, yang sering kali bekerja di sektor digital yang minim pengaturan, dapat mengumpulkan kekayaan tanpa membayar pajak yang sesuai, sedangkan pekerja di sektor formal dengan regulasi ketat harus mematuhi kewajiban pajak mereka. Ketidakadilan ini dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Sebagian kecil dari populasi menikmati keuntungan besar sementara yang lainnya harus menanggung beban yang tidak seimbang.

Lebih jauh lagi, untuk melindungi dan mempertahankan kekayaan mereka, banyak influencer memilih untuk berkolaborasi dengan politisi dan mendukung calon politik tertentu. Hubungan ini sering kali memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses istimewa dan menjaga kedekatan dengan kekuasaan, yang membantu mereka untuk terus mengkapitalisasi kekayaan mereka. Influencer yang terhubung dengan politikus dapat memperoleh keuntungan tambahan, seperti dukungan dalam hal regulasi yang menguntungkan mereka atau perlindungan dari tekanan hukum dan perpajakan.

Hubungan ini memperkuat ketimpangan ekonomi dengan menciptakan sistem bagi kekayaan dan kekuasaan yang saling terkait, menguntungkan sekelompok elit sementara memperburuk kondisi bagi masyarakat umum. Akibatnya, influencer tidak hanya menghindari kewajiban pajak tetapi juga memperkuat jaringan kekuasaan politik yang memungkinkan mereka untuk terus mengakumulasi kekayaan tanpa banyak batasan, mengakibatkan ketidakadilan yang lebih besar dalam distribusi sumber daya dan kekuasaan.

Dinamika dan tantangan pertumbuhan kelompok orang kaya baru di era digital

- 1 Kompleksitas Perpajakan
- 2 Ketimpangan Ekonomi
- 3 Ketidakadilan perpajakan sektor formal dan informal
- 4 Kolaborasi dengan Politisi
- 5 Penguatan Jaringan Kekuasaan





“

Ketika dunia sudah mempertontonkan pemborosan dan ketamakan ekonomi secara vulgar di tengah sebagian besar populasi yang sulit nafas karena himpitan kemiskinan dan keterbelakangan, akan ada satu masa ketika si miskin tak memiliki apapun untuk dimakan, maka satu-satunya cara bertahan hidup adalah memakan si kaya.

”

MENUJU EKONOMI BERKEADILAN



Mengangkat Harga Diri Piramida Terbawah

Mengapa Peningkatan Kesejahteraan Harus Menjadi Prioritas Utama?

Peningkatan kesejahteraan yang memprioritaskan manusia dan ekologi sangat penting karena dua hal ini adalah prasyarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai ekonomi yang adil dan merata. Konsep ini bertolak belakang dengan ekonomi konservatif yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak mempertimbangkan kelestarian alam. Sistem ekonomi perlu menjamin setiap manusia memiliki cukup sumber daya dan lingkungan yang nyaman, aman, dan bahagia.

Secara global, kekayaan para miliarder mengalami peningkatan 34% dan peningkatan pendapatannya naik 3 kali lebih besar dari inflasi. Indonesia mengalami masalah ketimpangan yang sama. Kelompok 1% memiliki pendapatan 73 kali lebih besar

dibanding kelompok 50% termiskin. Porsi pendapatan kelompok 50% termiskin juga terus mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir, sedangkan kelompok 10% teratas mengalami kenaikan 6,5%

Kondisi ini memerlukan perubahan sistem ekonomi secara sistematis dan progresif untuk mengoreksi ketidakadilan yang eksis. Maka, ekonomi kesejahteraan hadir sebagai sistem ekonomi berkeadilan yang memiliki prinsip-prinsip seperti : mengupayakan distribusi kekayaan, tujuan utamanya manusia dan ekologi, mencegah kerusakan alam, dan mengutamakan pengambilan keputusan oleh masyarakat (demokratisasi ekonomi).

Strategi untuk Mengurangi Ketimpangan secara Signifikan

Pengurangan ketimpangan membutuhkan langkah radikal dalam kebijakan ekonomi negara, seperti dengan kebijakan fiskal dan mengontrol kekuasaan korporasi. Negara juga harus memastikan kepentingan publik didahulukan dibanding kepentingan individu atau korporasi. Layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial harus diselenggarakan dengan optimal dan merata, serta menjadi prioritas. Negara juga

perlu memastikan tata kelola sumber daya publik ditingkatkan dengan memperkuat transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap lembaga-lembaga publik. Langkah ini juga harus berjalan beriringan dengan penghentian komersialisasi bidang dan hak publik seperti pendidikan dan kesehatan supaya terjaga sebagai public center daripada profit center.



Sumber foto: Dokumentasi CELIOS

Penghargaan untuk Korporat Adil, Penghukuman untuk Korporat Tamak

Indonesia tengah menghadapi gejala *disincentive society*, yakni fenomena ketika sistem dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk memberikan insentif pada kerusakan atau penyimpangan ekonomi, justru mengabaikan kinerja ekonomi yang bermanfaat. Contoh yang masif dan signifikan adalah alih alih memberikan disinsentif pada sektor ekstraktif seperti batu bara, pemerintah melalui kebijakannya lebih sering memberikan insentif baik fiskal maupun non fiskal. Sebaliknya, langkah-langkah untuk transisi energi yang berkeadilan malah tidak mendapat insentif yang cukup. Contohnya adalah pembatasan pembangunan panel surya atas *on-grid* Perusahaan Listrik Negara serta kurangnya investasi pemerintah pada pembangunan energi terbarukan lainnya.

Lima langkah praktis yang bisa kita tempuh :

- 1 Batasi penghindaran dan pengampunan pajak pada individu atau perusahaan super kaya (*tax amnesty dan family office*)
- 2 Transparansi data dan pelaporan pajak perusahaan multinasional
- 3 Pengungkapan pemilik sebenarnya (*beneficial ownership*) semua perusahaan, yayasan, dan entitas menuju pembuatan pendaftaran aset global.
- 4 Kerja sama internasional pengungkapan pajak
- 5 Mengurangi konsentrasi kepemilikan saham perusahaan sentralistis pada segelintir orang, baik dengan konsep koperasi, konsep melibatkan karyawan dalam dewan (BOD) perusahaan, memberikan sebagian saham untuk misi sosial dan lingkungan, dan transisi perusahaan menuju lebih demokratis atau dimiliki bersama (*coopetition*).



Urun Rembuk Pembiayaan Pembangunan

Pajak Kekayaan untuk Program Pembangunan

Potensi Pajak kekayaan 50 orang super kaya di Indonesia dalam perhitungan CELIOS mencapai Rp81,6 triliun dalam setahun. Dana ini setidaknya bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Pemerintah Indonesia membutuhkan dana Rp496,8 triliun untuk bantuan sosial atau perlinsos, dan makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun dalam satu tahun fiskal. Pajak kekayaan dapat dijadikan alternatif untuk membiayai program ambisius makan bergizi di era Prabowo. Apabila anggaran setiap paketnya sebesar Rp15.000 untuk konsumsi harian Masyarakat, maka dengan *wealth tax* 50 orang teratas mampu memberi makan 15 juta masyarakat sepanjang tahun.

Penerapan pajak kekayaan saja sudah bisa memberikan kontribusi 13% pada program melawan kemiskinan dan ketimpangan dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui kebijakan PKH dan

menambah pendapatan masyarakat melalui program ketenagakerjaan.

Alternatif pemanfaatan Pajak Kekayaan juga dapat disubstitusi untuk pembelian sapi premium. Pada harga jual tertinggi sapi premium sekitar 21,5 juta, pajak kekayaan dari 50 orang teratas dapat membeli sebanyak 3,8 juta ekor sapi premium. Sapi tersebut lebih dari cukup untuk memenuhi kelangkaan daging domestik hingga dua kali lipat atau menyuplai sebesar 570 ton setiap tahun.

Pajak kekayaan bahkan dapat digunakan untuk membeli 21 juta ekor kambing premium. Jumlah tersebut akan cukup dibagi merata setiap kecamatan memperoleh 2,9 ribu ekor kambing. Apabila pendistribusiannya membiarkan kambing dibanjarkan di pinggir jalan akan memanjang sampai 31 ribu kilometer atau lebih panjang dari total jalan negara di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.



Pajak kekayaan dari 50 triliuner terkaya dapat digunakan untuk:

339 Ribu Rumah

Pajak kekayaan dari 50 triliuner terkaya dapat membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

3,8 Juta Ekor Sapi Premium

Pajak kekayaan dapat membeli 3,8 juta ekor sapi premium untuk memenuhi kekurangan sapi nasional hingga dua kali lipat.

15 Juta Masyarakat

15 juta warga negara bisa mendapatkan makan siang gratis selama setahun dari pajak kekayaan.

558 Juta Paket Bantuan Beras

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin (10 liter beras per paket)[BY2]³⁷

Membangun >4 Juta Rumah Susun

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membangun lebih dari 4 juta lebih rumah susun bagi masyarakat miskin.³⁸

1,5 Hektar Tanah untuk 8,7 Juta Usaha Pertanian

Pajak kekayaan terhadap 50 triliuner terkaya dapat mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.

13,6 Juta Toilet Umum

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membangun lebih dari 13,6 juta toilet umum di daerah yang kurang sanitasi.³⁹

5,1 Juta Lampu Tenaga Surya

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membeli lebih dari 5,1 juta lampu tenaga surya untuk desa-desa terpencil.⁴⁰

Membiayai >408.000 Penelitian Ilmiah

Pajak Kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membiayai lebih dari 408.000 penelitian ilmiah dengan budget sebesar Rp200 juta per penelitian.

1.632 Pusat Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membangun 1.632 pusat rehabilitasi untuk pecandu narkoba.⁴¹

8,16 Juta Sikat Gigi

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membiayai lebih dari 8,16 juta sikat gigi untuk kampanye kebersihan gigi gratis.

Beasiswa 18.507.182 Mahasiswa

Pajak kekayaan hanya 2 persen atas kekayaan 50 triliuner teratas per tahun dapat membiayai biaya kuliah 18,5 juta mahasiswa⁴²

1.1 Miliar Paket Obat Generik

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membiayai lebih dari 1,1 miliar paket obat-obatan generik untuk penyakit umum.⁴³

877 Pusat Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membiayai lebih dari 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis.⁴⁴

Membeli 24.285.714 Kursi Roda

Pajak kekayaan 50 triliuner terkaya bisa membeli lebih dari 24,28 juta kursi roda untuk orang-orang dengan disabilitas.⁴⁵

Pajak Kekayaan untuk Pembiayaan Ekonomi Berkelanjutan

Pemanfaatan pajak kekayaan selain untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial ekonomi, tetapi juga bisa digunakan untuk mengatasi krisis iklim. Upaya melawan krisis iklim bisa dilakukan dengan program pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan program transisi energi ke energi terbarukan.

Estimasi dari Asian Development Bank (ADB) misalnya untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1 dibutuhkan anggaran hingga \$300 miliar atau

setara dengan sekitar Rp4,8 triliun. Maka, pajak kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia bisa mendanai pensiun dini hingga 17 PLTU Batubara dengan nilai yang sama. Selain itu, menurut Kementerian ESDM dan PLN setidaknya Indonesia membutuhkan dana Rp300-400 triliun per tahun untuk transisi energi. Pemberlakuan pajak kekayaan setidaknya bisa memberi kontribusi dana 20% dari kebutuhan pendanaan.



1.54 GW Energi Meningkat

Jika pajak kekayaan diinvestasikan untuk pembangkit listrik mikro hidro (KW), maka akan meningkatkan energi hingga 1.54 Giga Watt.



Restorasi 3,4 Juta Hektar Mangrove

Pajak kekayaan dari 50 orang terkaya dapat merestorasi **3,4 juta hektare** mangrove atau 11 persen hutan lindung.



Mengganti Kerugian Ekonomi dari Emisi Nikel

Pajak kekayaan dari sektor ekstraktif milik 50 orang terkaya cukup untuk mengkompensasi kerugian ekonomi dari emisi industri nikel di Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.



Restorasi 4,8 Juta Hektar Hutan Hujan Tropis

Pajak kekayaan dari 50 orang terkaya dapat merestorasi **4,8 juta hektare** hutan hujan tropis atau 36% dari angka deforestasi hutan alam.



Mengganti Total Biaya Kesehatan

Pebisnis hilirisasi batubara menikmati kebijakan royalti 0% yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp33 triliun. Padahal, pajak kekayaan 50 Triliuner teratas yang terafiliasi industri ekstraktif cukup untuk mengkompensasi total biaya kesehatan pensiun dini PLTU batu bara dalam skema penghentian tahun 2040



Mengganti Kerugian Periode Transisi

Pajak kekayaan cukup untuk pensiun dini PLTU batu bara dengan kompensasi selama periode transisi.



Mendanai Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat didanai secara tuntas dengan 21% dari kekayaan 5 orang terkaya di Indonesia.

Anekdote

▲ SIIUUUUUU!!

Hanya 0,2 persen dari total kekayaan lima orang terkaya cukup untuk membayar Cristiano Ronaldo sebagai atlet termahal dunia.

▲ 21 Juta Ekor Kambing

Pajak kekayaan lima puluh orang terkaya bisa membeli 21 juta ekor kambing premium. Apabila baris berbanjar di pinggir jalan, panjangnya sama dengan jumlah panjang jalan nasional gabungan di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua.

▲ Bansos Sebanyak 9 Baris Sepanjang Daratan Amerika

Jika pajak kekayaan didistribusikan secara sukarela melalui bantuan sosial senilai Rp500 ribu, antriannya akan berbanjar sebanyak 9 baris sepanjang daratan benua Amerika.

Harapan yang Masih Ada

Anak Muda Indonesia Dukung Keadilan Perpajakan dan Pengurangan Ketimpangan

Harapan akan perubahan sosial ekonomi yang berkeadilan dan menempatkan manusia serta lingkungan sebagai subjek masih ada. Survei IPSOS Global 2024 terbaru dari laporan Earth4All mengungkapkan bahwa 86% responden Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan. Dukungan ini juga terjadi di level global yang mana 70% responden mendukung pemberlakuan pajak tersebut. 82% responden Indonesia juga setuju pemberlakuan pajak yang lebih tinggi kepada perusahaan besar dan mendapat dukungan global sebesar 69%.

Temuan positif tidak hanya pada dukungan publik terhadap pajak berkeadilan, tetapi juga pada dukungan untuk aksi lingkungan.

Terdapat 80% responden Indonesia menyatakan bahwa tindakan besar diperlukan segera dalam perubahan iklim, lebih tinggi dari angka responden global yang hanya 71%.

Sinyal positif lainnya adalah demografi responden didominasi 37% angkatan muda yang berusia antara 18-34 tahun. Data ini menunjukkan potensi perubahan sosial pada generasi mendatang mengingat mayoritas responden Indonesia yakni 86% dalam survei tersebut menyatakan kebijakan ekonomi harus lebih memprioritaskan kesehatan, kesejahteraan masyarakat, alam dibandingkan fokus pada laba dan kekayaan semata.

Kesempatan untuk Perubahan, Kebebasan Pers sebagai Prasyarat

Perubahan pada masa depan perlu ditopang oleh pilar kebebasan pers. Kebebasan pers adalah representasi dari perubahan yang demokratis dan berkeadilan, karena tanpa adanya pers sebagai kontrol kebijakan, maka kekuasaan yang menjalankannya berpotensi korup. Dalam laporan Freedom House ditemukan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih tergolong lemah, terbukti poin civil liberties hanya mendapatkan 28 dari 60.

Skor rendah ini dikarenakan masih adanya kontrol dan pembungkaman media, bahkan melalui kriminalisasi dan kekerasan. UU ITE bisa dipakai untuk menangkap jurnalis yang

memberitakan isu sensitif seperti liputan tentang pertambangan. Aktivitas jurnalisisme media sosial juga sempat diredam dengan mematikan akses internet di beberapa daerah. Bahkan, Amnesty International menemukan bahwa sepanjang tahun 2019-2022 ditemukan kekerasan fisik dan digital kepada jurnalis sebanyak 133 insiden. Hal ini yang perlu diubah dahulu, yang mana ketimpangan ekonomi dan sosial tidak akan bisa diatasi tanpa ekosistem demokrasi yang optimal. Keadilan ekonomi hanya akan terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi bermakna dari semua elemen, termasuk media atau pers.


DIORAMA HARAPAN

“Kami dinilai sebagai benalu pendidikan yang minim kapasitas dan direkrut hanya atas kedekatan nepotisme. Padahal saya melihat sendiri betapa kurangnya pengajar di pulau terluar timur Indonesia. Selama 16 tahun mengajar sebagai guru honorer tapal batas, saya sudah mengupayakan pengangkatan dengan mengikuti beragam pelatihan dan masih gagal dalam ujian karena terbatasnya kuota dan kendala perangkat. Banyak orang menyamakan arti pengabdian guru di kota besar dan di perantauan. Saya sepanjang hari harus menyebrang pulau sekitar 20 menit hingga satu waktu kapal pernah terbalik. Selama ini saya hanya dibayar 100 ribu per tiga bulan. Disinilah saya memahami bahwa pendidikan lebih muda diucapkan daripada diajarkan.”

Guru Honorer di Tapal Batas


“Meski menjadi petani bukan cita-cita saya setelah dulu tak tamat SMP, namun kebutuhan memaksa saya untuk menghabiskan sepanjang hari di ladang milik paman. Saya hanya menjadi petani kecil di ladang saudara yang seringnya dibayar dengan makan siang seadanya. Dibalik kepasrahan saya yang hanya bergantung pada kemurahan hati paman, ternyata belum seberapa dibandingkan kondisi setahun belakangan ketika gencar dilakukan pengukuran tanah negara oleh aparat keamanan. Ladang paman seperti kebanyakan ladang warga desa lainnya dinyatakan sepihak sebagai tanah negara dan mendesak akan dibangun bandara. Sebagian warga melunak karna bandara dijanjikan akan memperluas pangsa pasar buah dan sayuran warga bahkan sampai diekspor ke luar negeri dan akan sangat menguntungkan. Namun nyatanya, bandara itu tak pernah dibuat untuk kepentingan kami. Sekarang keluarga saya sudah bukan petani lagi, uang kompensasi lahan pun hanya cukup untuk hidup beberapa bulan.”

Petani yang tergusur Bandara



“Laut sudah menjadi rumah bagi kami yang bertahun-tahun menjadi ABK kapal asing sampai tak ingat lagi apa yang masih tersisa di darat. Pilihan melaut jauh saya ambil setelah turunnya hasil tangkapan sebagai nelayan kampung yang terganggu dengan hilir mudik kapal tongkang batubara. Saya tak pernah mau tinggalkan keluarga, tetapi lautan disekitar rumah kami sudah bukan milik kami lagi. Setidaknya dulu saya masih punya kapal warisan wak buyut yang digunakan Bapak sebelum wafat. Namun, kapal harus saya relakan jual untuk modal pendaftaran dokumen dan paspor kerja ABK. Tak terasa 25 tahun sudah saya lewati dengan bekerja di kapal asing melalui penyalur ilegal. Hampir tak ada cerita baik di laut lepas, saya kurang makan, kerja 18 jam sehari, bahkan minum saja harus menampung air ac. Saya selalu kepikiran, kenapa laut yang luas tak cukup menyediakan hidup layak bagi pelaut kecil seperti kami.”

Nelayan yang Kehilangan Kapal dan Lautnya



“Saya warga kampung nelayan yang selama ini bertahan dari laju abrasi sekaligus terancam penggusuran pembangunan jalan raya dan trotoar kawasan wisata. Rumah kami telah direlokasi sehingga tak ada akses lagi buat kapal. Dari kehidupan pesisir seketika kami menghadapi hidup keras di pemukiman padat dengan jualan keliling seadanya. Kami tak pernah ingin mengganggu hak pejalan kaki dan keindahan tempat wisata, tetapi sudah tak ada tempat bagi kami untuk melangsungkan ekonomi keluarga. Orang selalu membayangkan bahwa tinggal dekat destinasi wisata terasa liburan sepanjang waktu, nyatanya kami tak pernah terhibur ketika keindahan pesisir kami digadaikan untuk wisata sementara kami direlokasi sepihak dan menjalani hidup ilegal yang nyaris selalu digusur dan dipersulit. “

Pedagang Keliling ilegal di Tanah Sendiri

“Saya selalu percaya bahwa pendidikan bisa mengubah apapun, asal punya cukup uang untuk membayar biayanya. Memasuki semester 9, saya masih terlunta-lunta menyusun tugas akhir akibat sempat tertahan mencari tambahan uang untuk melunasi cicilan pembayaran UKT. Sementara keluarga juga tak bisa mendukung banyak, ayah menjadi PNS dengan jenjang karir yang sudah mentok dan ibu hanya buka lapak kecil di sekolah. Beban semakin berat ketika adik baru diterima di universitas negeri unggulan. Kebijakan terbaru tahun ini mewajibkan uang pangkal dan perubahan sistem formulasi UKT. Dengan total pendapatan kotor keluarga sekitar 6 juta perbulan untuk menanggung 4 orang, adikku yang masuk fakultas teknik jalur mandiri dapat tanggungan uang pangkal 30 juta dan UKT tertinggi 12,5 juta per semester. Berbagai jalur pengajuan keringanan UKT sampai advokasi subsidi juga ditolak karena alasan kuotanya habis. Memang benar, pendidikan selalu mampu mengubah apapun, termasuk mimpi saya untuk selesai kuliah sudah tak penting lagi, sekarang tinggal menunggu waktu batas kuliah tanpa bisa melunasi ijazah.”

Mahasiswa Korban Pemiskinan Kampus

“Waktu kerja kami bertambah tanpa upah lembur, hanya dihargai perusahaan sebagai loyalitas. Kontrak kerja saya di smelter nikel tak pasti pasca Omnibus Law karena dapat diperbarui setiap tiga bulan. Perusahaan tak pernah serius dalam hal keamanan dan keselamatan pekerja. Saya sudah selama empat bulan ini tak kebagian masker khusus. Padahal posisi saya sebagai di divisi smelter dan gudang yang terpapar langsung oleh debu ore. Ruangannya tertutup dan penuh debu sehingga membatasi jarak pandang dan menyesak nafas. Kecelakaan adalah kejadian biasa mulai dari kaki patah tertindih beban, tangan hancur terlindas forklift mundur, hingga badan melepuh akibat cairan panas biji nikel. Kami yang masih bertahan bisa bicara hari ini, tapi siapa yang peduli dengan kawan-kawan kamu yang hilang dan mati tanpa kabar?”

Buruh Smelter Nikel Rawan Nyawa

REFERENSI

- ¹Lihat laporan terpisah: “Catatan Metodologi Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024”
- ²Kementerian Keuangan RI. (2024). Retrieved from Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Indonesia: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/apbn-2024:-optimalisasi-belanja-negara-untuk-mendorong-transformasi-ekonomi-di-tengah-tantangan-global>
- ³Kementerian Keuangan RI. (2024). Retrieved from Target Penerimaan Pajak: <https://pajak.go.id/id/berita/menkeu-penerimaan-pajak-ditargetkan-tumbuh-93-pada-rapbn-2024>
- ⁴Institute for Demographic and Poverty Studies. (2024, Mei 22). Retrieved from Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia: <https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/>
- ⁵Kementerian Perhubungan RI. (2022). Retrieved from Survei Pendapatan dan Biaya Operasional Ojek Online : <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221011091433-92-858884/survei-kemenhub-pendapatan-dan-biaya-operasional-ojol-hampir-sama>.
- ⁶Antara News. (2023, September 10). Retrieved from Menyelamatkan masyarakat dari jebakan pinjol ilegal: <https://www.antaraneews.com/berita/3720444/menyelamatkan-masyarakat-dari-jebakan-pinjol-ilegal>
- ⁷DDTC. (2022, September 19). Retrieved from Artikel ini telah tayang di DDTCNews dengan judul "Sistem Perpajakan Indonesia Justru Pro Orang Kaya, Benarkah?". Baca selengkapnya: <https://news-lite.ddtc.web.id/komunitas/lomba/42053/sistem-perpajakan-indonesia-justro-pro-orang-kaya-benarkah.>: <https://news.ddtc.co.id/komunitas/lomba/42053/sistem-perpajakan-indonesia-justro-pro-orang-kaya-benarkah>
- ⁸EU Tax Observatory. (2024). Global Tax Evasion Report. EU Tax Observatory.
- ⁹BBC News Indonesia. (2024). Retrieved from Pemerintah Indonesia mau tarik investasi dari orang superkaya - Apa itu Family Office dan enam hal yang perlu diketahui: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg3e7zv2p0zo>
- ¹⁰DDTC News. (2022). Retrieved from BKF Beberkan 4 Alasan Wajib Pajak Memilih Simpan Uang di Luar Negeri: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/37053/bkf-beberkan-4-alasan-wajib-pajak-memilih-simpan-uang-di-luar-negeri>
- ¹¹Media Indonesia. (2021). Retrieved from Indef: Pengampunan Pajak Wujud Kegagalan Pemerintah Ciptakan Sistem Adil: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/438011/indef-pengampunan-pajak-wujud-kegagalan-pemerintah-ciptakan-sistem-adil>
- ¹²CNN Indonesia. (2021, Maret 23). Retrieved from Sri Mulyani: Pelaku Fintech Cenderung Monopoli Atau Oligopoli: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210323110032-532-620878/sri-mulyani-pelaku-fintech-cenderung-monopoli-atau-oligopoli>
- ¹³Detik Finance. (2023, April 29). Retrieved from 4 Fakta Crazy Rich RI Beli Rumah Rp 2,2 T di Kawasan Elit Singapura: <https://finance.detik.com/properti/d-6695705/4-fakta-crazy-rich-ri-beli-rumah-rp-2-2-t-di-kawasan-elit-singapura>
- ¹⁴Indonesia Corruption Watch. (2022, Maret 21). Retrieved from Kelangkaan Minyak Goreng: Sesat Kebijakan Menyengsarakan Rakyat, Menguntungkan Korporasi Sawit: <https://antikorupsi.org/id/kelangkaan-minyak-goreng-sesat-kebijakan-menyengsarakan-rakyat-menguntungkan-korporasi-sawit>

- ¹⁵Badan Pusat Statistik. (2024, Januari 24). Retrieved from Realisasi Pendapatan Negara: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html%E2%80%8B%E2%80%8B>
- ¹⁶Meyersfeld, B. (2017). Empty Promises and the Myth of Mining: Does Mining Lead to Pro-Poor Development? *Business and Human Rights Journal*, 2(1), 31–53. doi:10.1017/bhj.2016.25
- ¹⁷United Nations. (2023, Oktober 10). Retrieved from Commodity-Dependent States Underperforming in Development, Expert Warns at Joint Meeting of Second Committee, Economic and Social Council: <https://press.un.org/en/2023/gaef3589.doc.htm>
- ¹⁸Oxfam America. (2001). *Extractive Sector and Poor*. Oxfam America.
- ¹⁹Centre of Economic and Law Studies. (2024). *Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Hilirisasi Nikel*. CELIOS.
- ²⁰Kompas.com. (2016, April 6). Retrieved from Ketua Serikat Pekerja BUMN Dipecat dari Perusahaan: <https://regional.kompas.com/read/2016/04/06/09034781/Ketua.Serikat.Pekerja.BUMN.Dipecat.dari.Perusahaan>
- ²¹CNBC Indonesia. (2023). Retrieved from Mimpi RI Negara Maju: Gaji Jadi Stimulus, Biaya Hidup Rendah: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231218110032-4-498143/mimpi-ri-negara-maju-gaji-jadi-stimulus-biaya-hidup-rendah>
- ²²DDTC News. (2022). Retrieved from BKF Beberkan 4 Alasan Wajib Pajak Memilih Simpan Uang di Luar Negeri: <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/37053/bkf-beberkan-4-alasan-wajib-pajak-memilih-simpan-uang-di-luar-negeri>
- ²³Bloomberg Technoz. (2024). Retrieved from Sumber Dana Proyek PIK 2 yang Direstui Jokowi Masuk PSN: <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/33606/sumber-dana-proyek-pik-2-yang-direstui-jokowi-masuk-psn>
- ²⁴Wahana Lingkungan Hidup. (2022). Retrieved from Indonesia Tanah Air Siapa?: <https://www.walhi.or.id/indonesia-tanah-air-siapa>
- ²⁵USAID Report. (2020). *Medium and Long Term Impact of Tax Expenditures*.
- ²⁶Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2023, Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal. <https://www.bpk.go.id/lkpp>
- ²⁷Oxfam International. (2024). *Inequality Inc: How corporate power divides our world and the need for a new era of public action*. Oxfam International.
- ²⁸OPPUK. (2016). Retrieved from Kebebasan ‘Semu’ Berserikat Diperkebunan Kelapa Sawit : <https://oppuk.or.id/berita/kebebasan-semu-berserikat-diperkebunan-kelapa-sawit/>
- ²⁹BBC News Indonesia. (2018, Mei 2). Retrieved from Buruh dan Calon Presiden : Diperdaya atau Menggalang Politik?: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43977922>
- ³⁰CNN Indonesia. (2019). Retrieved from Raffi Ahmad dan Artis Lain Kapok Kemplang Pajak Mobil Mewah: <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20191205102109-579-454362/raffi-ahmad-dan-artis-lain-kapok-kemplang-pajak-mobil-mewah>
- ³¹Tirto.id. (2024). Retrieved from Kronologi Dugaan Pencucian Uang Raffi Ahmad menurut ICW: <https://tirto.id/kronologi-dugaan-pencucian-uang-raffi-ahmad-menurut-ncw-gVc4>
- ³²Oxfam International. (2024). *Inequality Inc: How corporate power divides our world and the need for a new era of public action*. Oxfam International.
- ³³World Inequality Report (2022). *World Inequality Report*. World Inequality Lab.
- ³⁴CNBC Indonesia. (2023). *Aturan PLTS Atap Diubah, Pemakai Tak Bisa Jual Listrik ke PLN*. CNBC Indonesia.
- ³⁵Kementerian Keuangan. (2024). *Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Kementerian Keuangan.
- ³⁶Kompas. (2024). Retrieved from Datangi Istana, Sri Mulyani Laporkan Anggaran Rp 71 Triliun untuk Program Makan Siang Gratis: <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/24/12211701/datangi-istana-sri-mulyani-laporkan-anggaran-rp-71-triliun-untuk-program>

- ³⁷Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). E-Katalog. Retrieved from Harga Beras : <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/62928785>
- ³⁸Asumsi harga rumah susun per unit Rp20 juta
- ³⁹Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). E-Katalog. Retrieved from Harga Beras : <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/62928785>
- ⁴⁰Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2024). E-Katalog. Retrieved from Harga Beras : <https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/62928785>
- ⁴¹Antara News. (2011). Retrieved from Tender Pembangunan Pusat Rehabilitasi Narkoba Rp50 Miliar : <https://www.antaraneews.com/berita/260930/tender-pembangunan-pusat-rehabilitasi-narkoba-rp50-miliar>
- ⁴²Kumparan News. (2024, Mei 15). Retrieved from Rata-rata Biaya Pendidikan di Kampus Negeri Naik, di Swasta Malah Turun : <https://kumparan.com/kumparannews/rata-rata-biaya-pendidikan-di-kampus-negeri-naik-di-swasta-malah-turun-22kAU3aNbHo/full>
- ⁴³Harga Paket Obat Katalog LKPP senilai Rp70 ribu
- ⁴⁴Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2024). Retrieved from PPID Pembantu RSJD : <https://ppid.rs-amino.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/03/RBA-AMINO-2024.pdf>
- ⁴⁵Harga kursi roda dari Katalog LKPP sebesar Rp3.360.000
- ⁴⁶Responsi Bank. (2023, Februari 10). Retrieved from Indonesia's Cirebon 1 coal power project highlights gaps in ADB's 'coal-to-clean' ETM scheme : <https://responsibank.id/menu-berita/2023/indonesias-cirebon-1-coal-power-project-highlights-gaps-in-adbs-coal-to-clean-etm-scheme/>
- ⁴⁷Kompas. (2023). Retrieved from Meski Lambat, Indonesia Mampu Lakukan Transisi Energi Sesuai Target : <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/24/meski-lambat-indonesia-mampu-lakukan-transisi-energi-sesuai-target>
- ⁴⁸Earth4All 2024, Earth for All Survey 2024.
- ⁴⁹Freedom House. (2023). Retrieved from Freedom in The World : <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023#CL>



**Center of Economic and Law Studies
(CELIOS)**

Jl Abuserin, Kel. Gandaria Selatan,
Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia

E : admin@celios.co.id

W : celios.co.id